



Zahrotus Sa'adah, SIKom MA
Dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta

Di era 90-an kita familiar dengan kata 'dear diary'. Kata tersebut adalah bentuk representasi dari popularitas kebiasaan masyarakat menggunakan buku diary untuk berbagi masalah pribadi,

Pergeseran Tradisi dan Esensi 'Dear Diary'



Creative Economy Park

misalnya masalah percintaan, keresahan, kegembiraan atau bahkan aib sekalipun. Ungkapan-ungkapan tersebut tentunya sengaja ditulis di dalam buku diary karena si pemilik enggan berbagi cerita dengan orang lain. Sebab itu buku diary umumnya difasilitasi dengan gembok kecil atau pin untuk membukanya. Tidak hanya itu saja, dengan adanya buku diary ini secara tidak langsung membentuk perilaku masyarakat yang lebih memahami ruang privasi seseorang.

Sayangnya, seiring berkembangnya teknologi buku diary mengalami penurunan popularitas. Dewasa ini masyarakat memilih untuk

memakai buku 'diary digital' seperti blog atau media sosial. Berbeda dengan konsep buku diary sebelumnya yang benar-benar privasi, diary digital ini memiliki konsep lebih terbuka dan tentunya memungkinkan orang lain dapat membacanya. Namun, untuk menjaga konsep privasinya umumnya mereka hanya menyamarkan nama dari orang yang ingin mereka ceritakan. Meski berkonsep privasi nyatanya tradisi kepo orang Indonesia dapat memecahkan nama yang disamarkan tersebut.

Fenomena diary digital memang tidak dapat dihindari. Adanya fenomena tersebut merupakan dampak dari antusias masyarakat

atas kehadiran media sosial. Efeknya, besarnya rasa antusias menjadi lebih dominan dibandingkan dengan sikap dibawanya dalam bermedia sosial. Akan tetapi rasa antusias tersebut dapat menjadi boomerang bagi si pemilik cerita. Sebab berbagi cerita pribadi di media sosial dapat memberikan dampak negatif, misalnya pencemaran nama baik. Sebagai informasi, pemerintah sudah menetapkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE) yang mana isi dalam undang-undang tersebut terdapat pembahasan mengenai pencemaran nama baik, baik itu pencemaran secara lisan (Pasal 310 ayat 1), pencemaran secara tertulis

(Pasal 310 Ayat 2), dan juga tentang pengaduan palsu atau fitnah (pasal 317).

Adanya undang-undang tersebut merupakan bagian dari banyaknya kasus diary digital yang mulai tidak terkontrol. Sejauh ini banyak pengguna diary digital lebih memilih menyelesaikan melalui media sosial tanpa mempertimbangkan dampak yang dibuatnya. Padahal dalam sebuah konflik peran komunikasi interpersonal sangat penting, mengutip dari pandangan Devito (2009) komunikasi interpersonal memiliki lima tujuan utama, salah satunya adalah to relate. Istilah to relate ini merujuk pada makna 'hubungan'. Maksudnya dengan

adanya komunikasi interpersonal dapat menjaga sebuah hubungan dengan orang lain. Sebab dalam proses komunikasi interpersonal pesan kita dapat langsung diterima oleh komunikan sehingga jika ada kesalahan dalam menafsirkan pesan tentu kita sebagai komunikator dapat segera melakukan klarifikasi.

Selain itu, dengan adanya komunikasi interpersonal antara komunikator dengan komunikan juga dapat 'memprediksi' pola pikir masing-masing sebab mereka dihadapkan secara langsung (face to face). Sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik serta noise (gangguan) selama proses

komunikasi pun minim. Inilah kenapa keberadaan diary digital bukan solusi terbaik, sebaliknya dapat menciptakan konflik baru. Oleh karena itu, penting untuk dipertimbangkan kembali jika ingin mengumbar permasalahan di media sosial dan seyogyanya jika sedang berkonflik dengan seseorang maka selesaikan dengan komunikasi interpersonal. Seperti ungkapan dari Ali Bin Abi Thalib 'orang bijak pertama berpikir dan kemudian berbicara dan orang bodoh berbicara pertama dan kemudian berpikir.'***

Tata

Yogyakarta dan kota-kota besar lainnya di dunia sudah penuh sesak dengan bangunan-bangunan bertingkat. Baik hotel, restoran, sarana pendidikan, pariwisata, dan permukiman umum. Bangunan-bangunan tersebut perlu diatur dengan cara dilakukan seleksi penilaian yang ketat bagaimana sebuah bangunan harus memenuhi syarat yang ditentukan. Mereka tidak saja menambah beban lingkungan fisik, seperti penguasaan air tanah dan penutupan areal terbuka. Namun juga dampak-dampak sosial lainnya berupa kemacetan lalu lintas, konflik sosial, sampai potensi kriminalitas dan sebagainya.

Karenanya, untuk mengeluarkan SIMB, tidak cukup hanya berhitung di atas kertas dari sisi ekonomi, namun juga sosial, budaya, dan lingkungan. Artinya tidak hanya berhenti pada tata cara administratif belaka, namun harus ditimbang untung ruginya. Permasalahan ini bisa berlanjut terus jika pengawasan dan evaluasi tidak dilakukan secara serius. Seperti awalnya sebuah bangunan memenuhi syarat, namun dalam perkembangannya terjadi alih fungsi atau perluasan yang tidak dilaporkan.

Dari titik itulah, manajemen untuk mengurus SIMB harus benar-benar komprehensif, yakni edukatif, partisipatif, agresif, dan aplikatif. Edukatif adalah sarana pertama untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang kesadaran pendirian bangunan yang aman bagi lingkungan dan agresif adalah langkah tegas menindak para pelanggar IMB tanpa pandang bulu. Partisipatif adalah peran masyarakat untuk ikut mengawasi penyimpangan, dan aplikatif adalah kemudahan untuk mengurus jika syarat-syarat dipenuhi.

Tantangan terbesar adalah go-daan dari para pengusaha dan pembangun nakal sebagaimana dialami para pejabat tersebut. Para pengusaha nakal yang memiliki modal besar, berusaha untuk memaksimalkan untung, dengan cara menyuap para pejabat pemberi izin. Mereka paham, Kota Yogyakarta sudah penuh dengan bangunan dan hampir tidak ada lagi daya dukung lingkungan, maka upayanya adalah memaksakan kehendaknya.

Dengan demikian jelas jika

tudingan ini benar. Mereka bersama-sama merusak lingkungan kota dengan sadar. Padahal jelas bahwa bumi ini adalah titipan anak cucu, yang harus dikembalikan minimal sama dengan saat ini, syukur dijaga jauh lebih baik. Para pejabat pemerintah kota diamanahi untuk menjaga kotanya, dan mereka digaji oleh rakyat. Ji-

Sambungan hal 1

ka dalam bekerja justru merusak lingkungan yang mengancam keselamatan bersama, maka ini sebuah tragedi yang tidak dapat dimaafkan.

Ada sebuah ironi besar. Ketika seorang kepala daerah ikut merusak sumberdaya alam di wilayah yang mestinya menjadi tanggung jawab untuk dijaganya

sebagaimana dijanjikan ketika kampanye. Tata ruang tidak boleh dipelestick menjadi tata uang. Jika tata ruang orientasinya ke-serakahan, maka akan membawa kepada eunuch diri bersama. (Penulis, Profesor Ilmu Kependudukan dan Lingkungan Perkotaan, Anggota Dewan Riset Daerah Jawa Tengah)-d

DPD MENDORONG PEMBENTUKAN SISTEM PEMERINTAHAN DIGITAL



Panitia perumus Undang - Undang Pimpinan Pascasarjana dan Akademisi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

YOGYA (KR) - DPD dorong pembentukan sistem pemerintahan digital. DPD melalui alat kelengkapannya Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) melakukan uji sahil RUU tentang Pemerintahan Digital bertempat di Gedung AR Fakhruddin A It.5 UMY, Kamis, 23 Juni 2022. Pada kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) tersebut menghadirkan para Narasumber dari kalangan akademisi di Yogyakarta dengan pokok bahasan yakni rumusan RUU tentang Pemerintahan Digital yang juga menjadi usulan DPD dalam Prolegnas 2020-2024.

Urgensi pengaturan penyelenggaraan pemerintahan digital menjadi penting untuk dihadirkan mengingat perkembangan dunia teknologi informasi dan digitalisasi saat ini telah merambah ke segala lini, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan ekonomi masyarakat, sampai dengan pelaksanaan kehidupan masyarakat sehari-hari, ungkap Dra. Ir. Hj. Eni Sumarni, M.Kes, Pimpinan PPUU dalam pengantar diskusi yang disampaikan di awal kegiatan. Lebih lanjut Eni Sumarni menyampaikan bahwa pelaksanaan digitalisasi tersebut tentunya akan sangat tergantung dari hadirnya sebuah sistem pemerintahan digital yang mendorong terbentuknya sebuah pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna menjamin terpenuhinya setiap kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut, Muhammad Afnan Hadikusumo, Senator asal DIY, dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa kehadiran RUU tentang Pemerintahan Digital ini tentunya dapat dijadikan momentum bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahannya yang saat ini memiliki tuntutan yang sangat kompleks. Lebih lanjut Afnan menyampaikan

bahwa kebutuhan digitalisasi tidak hanya dibutuhkan ditingkat pusat, akan tetapi di tatanan pemerintahan desa sebagai sebuah tingkatan pemerintahan, juga membutuhkan sebuah sistem digitalisasi agar dapat bersaing secara global. Pemerintahan digital sudah tidak dapat digolongkan hanya untuk pemerintahan ditingkat pusat akan tetapi juga dibutuhkan di tatanan tingkatan pemerintahan di daerah, atas dasar inilah DPD hadir untuk menginisiasi sebuah landasan hukum yang dapat mendorong pembentukan pemerintahan digital yang lebih inklusif dan merata di semua daerah, tutup Afnan.

Dalam diskusi tersebut, juga berkembang gagasan-gagasan terhadap materi muatan yang harus tercantum dalam rumusan RUU usul inisiatif DPD tersebut. Salah satu Narasumber Dr. Ulung Pribadi, M.Si, Dosen Ilmu Pemerintahan UMY menyampaikan bahwa seharusnya dalam RUU Pemerintahan Digital yang disusun DPD dapat mengubah paradigma "electronic government" menjadi "electronic governance", dengan demikian akan melahirkan satu bentuk pemerintahan yang terintegrasi melalui hubungan yang sinergis antara pemerintah, pelaku ekonomi, pelaku industri, pengguna (customer), dan masyarakat serta mendorong terbentuknya mekanisme penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah yang melibatkan semua stakeholders secara bersama-sama dan setara (engagement).

Di akhir kegiatan uji sahil tersebut juga disimpulkan bahwa masukan serta saran dan pendapat yang berkembang akan ditindaklanjuti oleh PPUU dalam tahap finalisasi RUU untuk kemudian diputuskan dalam Sidang Paripura DPD sebagai RUU usul inisiatif DPD dan disampaikan kepada DPR dan Presiden agar dapat segera dilakukan pembahasan bersama. (*)

OPINI

MENEKAN ANGKA KEMISKINAN MELALUI PEMBERDAYAAN BERBASIS DESA

Oleh: Wisnu Hermawan

Berita Harian Kedaulatan Rakyat pada 22 Juni 2022 memberikan informasi bahwa Kemiskinan Ekstrem perlu penanganan khusus. Dari 474 ribu warga miskin di DIY, sekitar 160 ribu diantaranya masuk pada kategori miskin ekstrem. Problem kemiskinan dan ketimpangan terus menghantui pembangunan daerah selama lebih dari 15 tahun terakhir, karena angkanya selalu di atas rerata nasional. Data dari BPS DIY selalu menunjukkan bahwa tren kedalaman kemiskinan di pedesaan biasanya lebih tinggi daripada perkotaan.

Berbagai program prioritas baik pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga terus menggalakkan berbagai program untuk mengentaskan kemiskinan. Namun, progres impact dari pelaksanaan program tersebut seakan sulit untuk menekan angka kemiskinan, terutama di DIY. Bahkan baru-baru ini, ditegaskan oleh Menteri Koperasi UKM RI bahwasanya pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen adalah bagian dari prioritas penanganan oleh Pemerintah. Salah satu arahnya adalah menumbuhkan ekonomi produktif di pedesaan karena basis pelaku usaha mikro kecil ada di desa.

Desa Preneur

Salah satu skema pengentasan kemiskinan dan juga ketimpangan yang beberapa tahun ini dijalankan Pemda adalah desa preneur. Desa Preneur adalah pendekatan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat desa untuk menumbuhkembangkan spirit wirausaha. Asumsinya, warga miskin bersama warga lainnya bekerjasama membangun basis ekonomi produktif skala pedesaan untuk mewujudkan produk unggulan desa. Upaya itu, dilakukan dengan memperhatikan enam aspek, yakni produksi, sumberdaya manusia berbasis wirausaha, kelembagaan, literasi keuangan, pemasaran dan ekonomi digital. Harapannya, ekonomi produktif akan tumbuh secara komunal yang digerakkan oleh warga melalui rekayasa sosial dalam menggalakkan spirit wirausaha.

Baik warga miskin, warga yang rentan miskin atau warga yang tidak masuk dalam kategori miskin harus saling bekerjasama membangun wilayahnya melalui skema ekonomi produktif. Saat ini, sudah terdapat 51 desa di DIY masuk dalam kategori desa preneur. Skema pendampingan ini tidak cukup dilakukan dalam satu tahun anggaran, melainkan berlanjut minimal tiga tahun anggaran. Hal ini dimaksudkan, spirit ekonomi produktif tidak hanya diimplementasikan melalui pelatihan dan fasilitasi alat, melainkan proses pendampingan juga dilakukan secara terukur.

Pendampingan Desa Preneur ini dilaksanakan dengan menggandeng sejumlah expert dari praktisi pendamping UMKM atau akademisi pembangunan pedesaan. Tak kurang terdapat empat pendekatan pendampingan desa preneur, diantaranya adalah (1) Global Gotong Royong Tetrapreneur, (2) Kiblat Papat Lima Pancer Adiluhung Kawentar, (3) Gemah Ripah Loh Jinawi dan (4) Blangkong (bermuatan lokal, bersaing global, berbasis komunal). Semua pendekatan tersebut dipilih dengan pertimbangan memiliki konsep pemberdayaan desa yang menguatkan spirit enterpreneur secara berkelanjutan.

Spirit Kolaborasi dan Kualitas Kegiatan

Pemberdayaan melalui desa preneur akan lebih bagus efektifitasnya, apabila juga dikolaborasi dengan skema-skema pembangunan berbasis desa yang dijalankan oleh stakeholder lainnya. Sebut saja, pendekatan pembangunan berbasis desa seperti desa budaya, desa wisata, desa prima, desa tangguh bencana, desa mandiri budaya, kampung KB hingga desa maritim. Semuanya dijalankan pada lokus masing-masing dengan cukup massif sebarannya sesuai tematik sektoralnya.

Apabila sejak dari aspek perencanaannya terdapat orientasi lokus dan fokusnya, dimana satu sama lain dalam skema pembangunan pedesaan oleh masing-masing pendekatan itu sudah saling bekerjasama, maka upaya pengentasan kemiskinan akan jauh lebih mudah. Tentunya memerlukan dirigen yang memahami tata kelola perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi yang berkelanjutan. Sudah saatnya saat ini masing-masing sektor berkolaborasi untuk saling bekerjasama dan bukan sekedar sama-sama bekerja.

Besaran alokasi anggaran yang digelontorkan pada suatu wilayah untuk pengentasan itu penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana memahami kualitas kegiatan. Apakah output itu sekedar mengejar target administrasi belaka atau output itu memiliki kualitas yang mendukung pencapaian outcome. Melalui pendekatan kolaborasi dalam pemberdayaan berbasis desa, harus diimbangi dengan kualitas pelaksanaan kegiatan yang benar-benar dilakukan untuk pengentasan kemiskinan secara efektif. Tentu, tidak ada kesan "menang-kalah" dalam upaya pemberdayaan melainkan semuanya dilakukan untuk membantu pencapaian visi misi pembangunan daerah dan menyelesaikan permasalahan daerah secara berkelanjutan.

*Penulis adalah: Kepala Bidang Layanan Kewirausahaan KUKM, Dinas Koperasi UKM DIY

RUANG USAHA	RUMAH DIJUAL	RUMAH DIJUAL	TANAH DIJUAL	TANAH DIJUAL	TANAH DIJUAL
Disewakan / Operkontrak Gudang Di Atas Tanah 610M2 Bangunan 250M2. Listrik 7700Watt, Air Jet Pum.Lokasi Di Dusun Karangnongko RT.03 Sumberagung Bantul.081229201309 5 / 00420/0622	Rmh djl 2lnt.LT:228,5Kt,1Kmr pmbntu, 3Kmd,grsi 3mbl,Pam,sumur,PerumGPA Jakal Blok DS4 H.081904178261 3 / 00786/0622	Jual rmh & kos di lt2 Nanggulan RT007/RW017 No 41 Maguwaharjo Depok Sleman DIY Harga 2,8M Nego Hub lsg 081514538539/08164859128 TP 4 / 00929/0622	BU/Tanah SHM Sendiri Lt:316m2, Ld:15,8m Lok:Jl.Nasional,400m Barat Bandara BIY/YIA Yk:081578097070P 3 / 00852/0622	SHM Lt:220 Lb:120 5Kt,2Kmd,Carpport 2Mbl,Kp Cungkug Gg.Cendrawasih 128 Btl.Hrg:900Jt Ng.08159459491 3 / 00911/0622	Pekarangn Mrh Ls:165m Ld:10m Utr Perum Pertamina Purwomartani, Brt Pasar SHM Gp:1,7Jt/m 081392498081 3 / 01027/0622
Dikontrakkan Tanah Tepi Jl Wates Km6 (utara Jalan) Hub.081392963417 3 / 00599/0622	Rmh SHM LT:165 LB:115 3Kt,2Km, Grs,Carpport Jl.Wates Km3,5 Banyu Raden Tegalyoso Sleman H.081327423853 Only WA Maaf TP Dekat Kampus. 4 / 00820/0622	Jual cpt Rumah L2072m LB717m lok.Pusat kota dkt Tugu YK harga 65jt/m nego BU serius Hub.08562892824 3 / 00964/0622	Luas 589m2 SHM Lokasi 1km utara Bandara Adi Sucipto Ds Purwomartani Hub:0811100610 3 / 00014/0622	Pekr Lt150m2 Ld10m2 pemukiman baru loks dkt SMAN2 Banguntapan,slnterminal H.2,4Jt/m Ng 08122719807 3 / 00932/0622	Tanah mrh LS440m LD12m pinggir jln raya utara Purwomartani cck utk usaha Hg2,7Jt/m Hub:081392498081 3 / 01027/0622
Disewakan Space utk Kantor&Food Court.H:Wisma Hartono ex BDNI (PT. Citra Indojaya Perkasa) Jl.Jend.Sudirman No.59 YK T.(0274) 552001 / 0888 680 2924 5 / 00854/0622	Rumah Exs Rumah Makan Wukirsari Sembungan Wukirsari Luas:600m,ada Kolam Ikan Hub:081223707019 3 / 00823/0622	Rumah Kecil LT/LB:50m 2Kt,Jl Mobil Msk,Brt Bugisan,dkt Stikes,Hrg:248Jt Ph:0877 3888 3699 3 / 01008/0622	Djl Tnh Kapling Lt:140m2 diTampungan Sendangtirto Berbah Slmn,TmrBlok O.Hub P.Rahmad:087738356503 3 / 00569/0622	Pekr Lt110m2 Ld8m Jl Conblok,UtrBalai Desa Banguntapan, Jl.Gedongkuning. H:4,6Jt/m2 Ng. 087738467654 3 / 00933/0622	Tanah mrh LS440m LD12m pinggir jln raya utara Purwomartani cck utk usaha Hg2,7Jt/m Hub:081392498081 3 / 01028/0622
Kios Ukuran 3.5x6 di Genengan Potorono Banguntapan Bantul Hub: 081393749169 3 / 01006/0622	Rmh SHM LT/LB60m2 dkt Hyatt Plgn 2Km Tdr,1Km Md,Dpr,Rtamu Rp.400Jt/ Ng Lok PD Tamsis JTR 0818422340 3 / 00825/0622	Rmh Tepi Jl Aspal LT213/LB150.LD14 KTdr3,KM2,AC5,Klm Koi,Lok Ngtrito Kwns Premium,dkt U Aisyah,Strategis C/U:Kos,Ruko H:2,2Milyar H:0 81578740122 BU Ski Maaf TP 5 / 01026/0622	Dijual tanah+bangunan rmh L 425m1,2 m (nego) di Wonosari Gunung-Kidul(dlm kota) hub 087705061960 3 / 00589/0622	Tnh Pek SHM L240m a/n Sendiri LokBrt SMPN 1 Sewon Jl Paris Km7 H:800rb/m Nego Hub 085100395228 3 / 00946/0622	Dijual Tnh Pek Lok Jl.Paingan 34cck utk Kos/Tmpt Tgl,Ling KmPs Lt:271m2 Ld:16,5m HP:08139244461 TP 3 / 01028/0622
Ruko 2lt Jl.Pleret dpt SPBU samping roti gembong,45jt/th min 2th TP .081228671067 3 / 01046/0622	Dijual Rumah Mewah Harga Murah .Lokasi Strategis LT:197m2 LB:100m2 Hub:0811397041 3 / 00833/0622	Rmh SHM Ls90m KT,2KT,2KM Hg:450jt Jl.Garuda Masuk 100m Pringgolayan Bgtp,Dekat Stipram H:08156860134 3 / 01033/0622	Tanah dijual daerah Berbah KlayarLuas 285 m2 Harga Permeter 2,7 Nego Hub:081217932205,087870404845 3 / 00819/0622	Nyatal!Tnh SHMP Lt:3200m Jl Aspa IBrimob Sentolo keUtara,dkt RSUD H:1,3Jt/m Dpt 5400m T:087738883699 3 / 01007/0622	Pekarangn 1000m2/475Rb Kebun Sallak Madu di Tempel Ld:30m HP: 082138089175 3 / 01030/0622
Dijual cepat ruko besar 2,5Lantai di Jl.Raya Godean Km.5 (dlm Ringroad), Lt:200m,Lb:350m,lebar:7,5m 5kt,4km, parkir luas,hrg:3,95M hub Pemilik Langsung:081802798055(TP) 5 / 01046/0622	Dijual Rmh bgs&luas di perum jl.godean dlm RR, lt 236, lb +-300. 6KT, 4 KM, garasi,carport, Sertifikat lengkap, 2,750 M serius nego.H: 088802698816 (maaf TP) 5 / 00898/0622	Rmh Mewah (baru)SHM, LT309m2, LD200m2, 4Kt,4KM,Swimming pool, Lingk Elii/Nyaman Dipusat Kota di Jl Mawar 30 Baciro,WA:087839410497 4 / 01036/0622	Jual Tanah Pek.utara Jl Gito-GatiLuas 143m2 Ld 7,5m,Harga Rp 4,7jt&Utara Jejamuran luas 114m2 Ld 9mHrga 2jt Nego Hub.082135479511 4 / 00876/0622	Dijual Tanah Sawah Lt:3736m2 di Dsn Sendang Kel Sendangtirto,Dkt Balai Kelurahan Hub:082243802656 3 / 01012/0622	SHM Luas 1590M2, LD 20M Lokasi Pendem Sidomulyo Pengasih Kulon Progo Mangku Jalan Aspal Hrg 500 Ribu/M Hub:083 840 868 982 4 / 01038/0622
Dijual rumah siap huni,mobil masuk di Seyegan Sleman Hub:081311416979 3 / 00881/0622	Dijual Rmh/Ruko SHM LB:150 LT:820, 4KT,Atas Bawah 2KM,2Dpr,Hrg:1,1M Nego, Timur Pasar Sungapan,Dpn Pabrik Srg tgn Hub:081283634049/ 081388711175/082226407879 5 / 00979/0622	Hanya 410Jt Jual Rumah Mewah di Piyungan Jogja Lt1190m2 SHM 4kt cocok jual beli 081393812242 3 / 01037/0622	Tanah 75jt free blk nama,25mnt darikota jogja,lokasi sentolo wa 083101054002 3 / 00879/0622	Pek Mrh di Condongcatut Ls:2325m Ld:40m SHM cck utk Kos/Kapling,Utr Pamela 6 Hg1,8Jt/m 081392498081 3 / 01027/0622	Jl Besi-Jangkang Utr 1Km LT/LD 390/9 Bns Pondasi cck utk Rmh,Gudang,Resto Sawah,1Jt/m 081904295921 3 / 01041/0622
		RUMAH DIKONTRAKKAN			TANAH DIKONTRAKKAN
		Diktrkn Rmh di Karangjati,Utr Tugu Yoga, Brt Bakpia Perajog Ls Rmh/Tnh+70/100,Hdp Utr,Lkp,PLN dan PAM. Hub:08812778000. 4 / 01011/0622			SHMP 1982m LD18m Jl.Kab Sleman, 400m Utara Jl Godean km 4.Hub:P.Sus 085601934617 H:3,8jt/m 3 / 01044/0622